

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal pada RKPD Kota Mojokerto Tahun 2018, maka perlu dilakukan perubahan dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan pada pendapatan meliputi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah. Sedangkan pada sisi belanja meliputi program/ kegiatan, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rincian perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan daerah pada komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah masing-masing adalah sebagai berikut.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada Tema RKP tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%(*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97%; Jawa sebesar 6,23%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04%; Kalimantan sebesar 4,37%; Sulawesi sebesar 7,35%; Maluku sebesar 6,18% dan Papua sebesar 6,87%.
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5%(*); dengan sasaran tingkat kemiskinan per wilayah: Sumatera sebesar 10,25%; Jawa sebesar 9,45%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87%; Kalimantan sebesar 5,40%; Sulawesi sebesar 9,96%; Maluku sebesar 12,52 % dan Papua sebesar 25,85%.
3. Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44%(*); dengan sasaran tingkat pengangguran per wilayah: Sumatera sebesar 4,80%; Jawa-Bali sebesar 5,90%; Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80%; Kalimantan sebesar 5,10%; Sulawesi sebesar 4,00%; Maluku sebesar 4,90% dan Papua sebesar 3,60%.

4. Laju inflasi 3,5%.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2018. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dimana harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

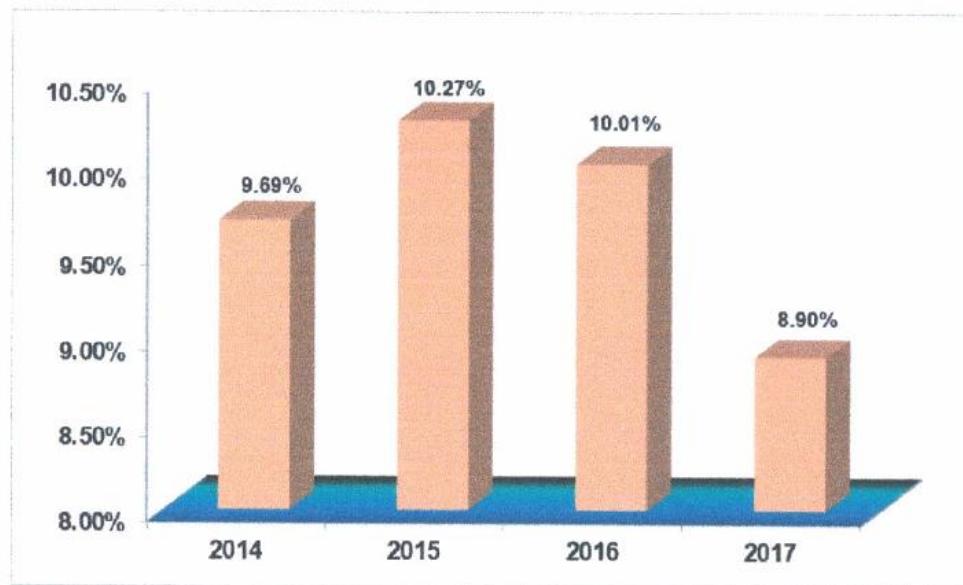
Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis, maka arah kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan *agroindustry*/ agrobisnis.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun syaratnya adalah bahwa pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto harus dibarengi dengan pengendalian laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat karena tingkat pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang dicerminkan dari naiknya tingkat inflasi.

Salah satu cara untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto dapat dijelaskan bahwa mulai tahun 2014 cenderung mengalami fluktuasi, dimana tahun 2014 diperoleh pertumbuhan sebesar 9,69%, tahun 2015 naik menjadi sebesar 10,27%, tahun 2016 menurun sebesar 10,01% dan pada tahun 2017 juga mengalami penurunan menjadi 8,90%. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

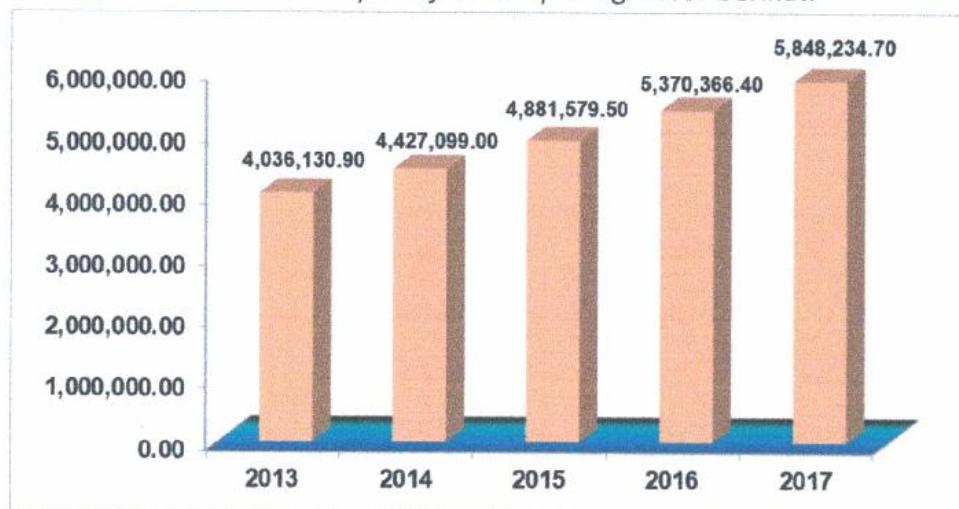
Sedangkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dirinci menurut lapangan usaha Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

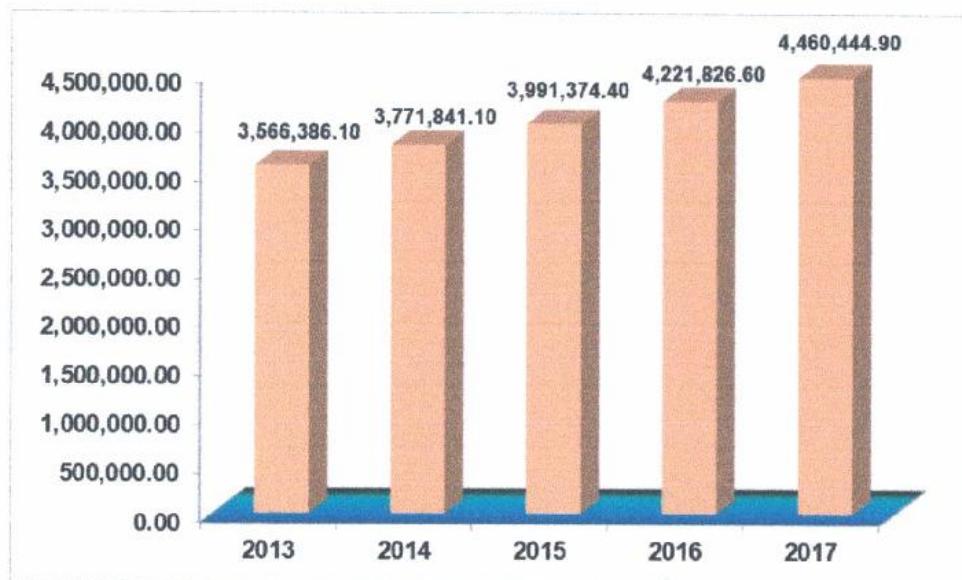
Sektor		2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.11	9.71	8.65	4.75
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	10.95	11.41	10.42	10.26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.33	11.65	7.53	14.17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.48	3.45	5.25	6.35
F	Kontruksi	11.26	8.68	9.00	7.62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.93	9.59	9.76	10.29
H	Transportasi dan Pergudangan	10.83	10.27	10.53	12.01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.42	12.36	13.49	9.70
J	Informasi dan Komunikasi	8.37	8.45	7.90	9.15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.32	12.66	12.79	6.62
L	Real Estate	5.35	10.82	8.80	5.65
M,N	Jasa Perusahaan	9.84	10.90	10.08	9.12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.11	13.16	10.17	6.82
P	Jasa Pendidikan	10.14	11.97	11.17	6.01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.40	9.31	9.86	12.11
R,S,T,U	Jasa Lainnya	11.54	8.46	8.02	6.41
PDRB		9.69	10.27	10.01	8.90

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kontribusi sektor menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto tahun 2014 terbesar yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,42%, tahun 2015 kontribusi terbesar yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,16%, untuk tahun 2016 kontribusi terbesar yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,49% dan pada tahun 2017 kontribusi terbesar yaitu dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,17%. Sedangkan perkembangan PDRB baik berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017 dapat dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 3. 2: Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017 (000.000 Rupiah)



Gambar 3. 3: Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017 (000.000 Rupiah)

Sedangkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mojokerto berdasarkan sektor selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3. 2: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,365.90	30,405.20	33,356.30	36,242.80	37,964.10
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	444,758.40	493,475.90	549,758.00	607,057.60	669,352.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,915.20	3,245.40	3,623.40	3,896.10	4,448.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,341.10	5,420.00	5,607.20	5,901.30	6,276.10
F	Kontruksi	447,848.40	498,294.20	541,560.90	590,293.60	635,252.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,198,910.90	1,305,946.50	1,431,175.30	1,570,898.40	1,732,507.90
H	Transportasi dan Pergudangan	104,338.20	115,640.40	127,521.90	140,949.20	157,883.70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	253,413.30	287,412.50	322,941.40	366,509.00	402,044.40
J	Informasi dan Komunikasi	500,057.90	541,917.60	587,698.40	634,136.30	692,159.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	318,695.80	357,948.40	403,275.70	454,837.70	484,930.20
L	Real Estate	119,925.80	126,341.70	140,016.30	152,339.60	160,951.10
M,N	Jasa Perusahaan	31,355.50	34,439.70	38,193.50	42,042.40	45,875.9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	201,924.60	206,186.20	233,319.50	257,043.40	274,567.70
P	Jasa Pendidikan	183,611.30	202,236.40	226,443.70	251,738.30	266,872.90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46,131.00	51,391.00	56,174.60	61,711.00	69,182.20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	149,537.30	166,797.70	180,913.50	195,431.60	207,967.20
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		4,036,130.90	4,427,099.00	4,881,579.50	5,370,366.40	5,848,234.70

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

Tabel 3. 3: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017 (000.000 Rupiah)

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,703.20	23,754.30	24,470.50	24,952.60	25,355.70
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	379,754.70	400,592.70	427,100.60	451,445.10	479,254.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,462.20	3,497.70	3,713.00	3,835.60	3,996.80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,228.30	5,217.70	5,346.60	5,561.10	5,837.90
F	Kontruksi	396,163.00	420,012.90	434,903.60	455,974.70	483,704.00

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,059,673.90	1,120,277.40	1,185,370.80	1,250,937.60	1,327,943.00
H	Transportasi dan Pergudangan	93,263.60	96,877.70	102,007.60	107,657.20	115,047.80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	216,260.30	229,793.20	244,232.00	261,940.50	281,231.90
J	Informasi dan Komunikasi	485,602.20	523,834.60	563,279.30	604,073.10	644,050.10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,980.20	280,530.40	297,276.90	315,463.60	325,381.60
L	Real Estate	104,113.10	109,028.10	113,705.50	119,383.60	123,842.60
M,N	Jasa Perusahaan	26,417.40	28,291.50	29,865.50	31,343.70	33,001.90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	171,841.60	173,818.10	183,381.60	192,780.70	199,252.20
P	Jasa Pendidikan	157,034.20	165,026.20	175,620.90	185,641.20	192,720.40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42,055.70	44,780.00	47,287.70	50,010.60	52,714.50
R,S,T,U	Jasa Lainnya	138,832.40	146,508.60	153,812.40	160,825.90	167,110.00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan		3,566,386.10	3,771,841.10	3,991,374.40	4,221,826.60	4,460,444.90

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2017 adalah 4,460,444.90 miliar rupiah, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 5,848,234.70 miliar rupiah. Kelompok sektor primer berangsur-angsur menurun peranannya sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, hal ini disebabkan oleh sangat kecilnya peranan sektor pertanian. Penurunan kontribusi kelompok sektor primer tersebut menyebabkan kenaikan kontribusi pada kelompok sektor tersier, dimana kontribusinya jauh melebihi sektor sekunder. Sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa penurunan kontribusi sektoral disebabkan oleh kenaikan yang relatif lebih cepat dari kontribusi sektor tertentu dibanding sektor lainnya.

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa ada tiga sektor ekonomi yang sangat dan sektor Kontruksi. Ketiga sektor ini mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto, sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, ketiga sektor ini bisa digenjot untuk ditingkatkan produktivitasnya.

Perkembangan kontribusi sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013 - 2017 disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi diatas 29%, kemudian terbesar kedua disumbang oleh sektor Informasi dan Komunikasi, dan terbesar ketiga disumbang oleh sektor Industri Pengolahan. Untuk lebih jelasnya kontribusi berdarkan sektor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4: Perkembangan Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017 (%)

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.68	0.69	0.68	0.67	0.65

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	11.02	11.15	11.26	11.30	11.45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11
F	Kontruksi	11.10	11.26	11.09	10.99	10.86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.70	29.50	29.32	29.25	29.62
H	Transportasi dan Pergudangan	2.59	2.61	2.61	2.62	2.70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.28	6.49	6.62	6.82	6.87
J	Informasi dan Komunikasi	12.39	12.24	12.04	11.81	11.84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.90	8.09	8.26	8.47	8.29
L	Real Estate	2.97	2.85	2.87	2.84	2.75
M,N	Jasa Perusahaan	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.00	4.66	4.78	4.79	4.69
P	Jasa Pendidikan	4.55	4.57	4.64	4.69	4.56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.14	1.16	1.15	1.15	1.18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3.70	3.77	3.71	3.64	3.56
PDRB		100	100	100	100	100

Tabel 3. 5: Perkembangan Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mojokerto Tahun 2013 - 2017 (%)

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.64	0.63	0.61	0.59	0.57
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	10.65	10.62	10.70	10.69	10.74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13
F	Kontruksi	11.11	11.14	10.90	10.80	10.84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.71	29.70	29.70	29.63	29.77
H	Transportasi dan Pergudangan	2.62	2.57	2.56	2.55	2.58

Sektor		2013	2014	2015	2016	2017
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.06	6.09	6.12	6.20	6.31
J	Informasi dan Komunikasi	13.62	13.89	14.11	14.31	14.44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.40	7.44	7.45	7.47	7.29
L	Real Estate	2.92	2.89	2.85	2.83	2.78
M,N	Jasa Perusahaan	0.74	0.75	0.75	0.74	0.74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.82	4.61	4.59	4.57	4.47
P	Jasa Pendidikan	4.40	4.38	4.40	4.40	4.32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.18	1.19	1.18	1.18	1.18
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3.89	3.88	3.85	3.81	3.75
PDRB		100	100	100	100	100

Sedangkan pertumbuhan kontribusi sektor menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 6: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2017 (%)

Sektor		2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.63	3.02	1.97	1.62
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Industri Pengolahan	5.49	6.62	5.70	6.16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.03	6.16	3.30	4.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.20	2.47	4.01	4.98
F	Kontruksi	6.02	3.55	4.85	6.08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.72	5.81	5.53	6.16
H	Transportasi dan Pergudangan	3.88	5.30	5.54	6.86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.26	6.28	7.25	7.36
J	Informasi dan Komunikasi	7.87	7.53	7.24	6.62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.27	5.97	6.12	3.14
L	Real Estate	4.72	4.29	4.99	3.74
M,N	Jasa Perusahaan	7.09	5.56	4.95	5.29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.15	5.50	5.13	3.36
P	Jasa Pendidikan	5.09	6.42	5.71	3.81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.48	5.60	5.76	5.41

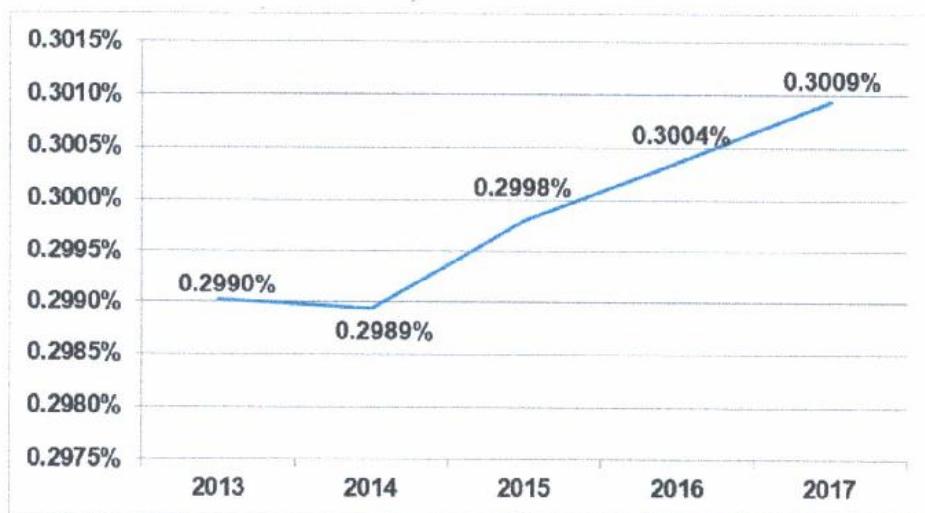
Sektor	2014	2015	2016	2017
R,S,T,U Jasa Lainnya	5.53	4.99	4.56	3.91
PDRB	5.76	5.82	5.77	5.65

Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kontribusi sektor menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Mojokerto tahun 2014 terbesar yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,87%, tahun 2015 kontribusi terbesar tetap pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 7,53%, untuk tahun 2016 kontribusi terbesar yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,25% dan pada tahun 2017 kontribusi terbesar yaitu dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,36%.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2017 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto tahun 2017 adalah sebesar 5,65 persen dimana mengalami perlambatan 0,12 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,77 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan terjadinya inflasi di beberapa komoditi.

Dilihat dari perkembangan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Kota Mojokerto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur menunjukkan kontribusi yang masih rendah hanya sekitar 3%. Diharapkan pada tahun mendatang kontribusi Kota Mojokerto bisa lebih besar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Perkembangan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Kota Mojokerto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



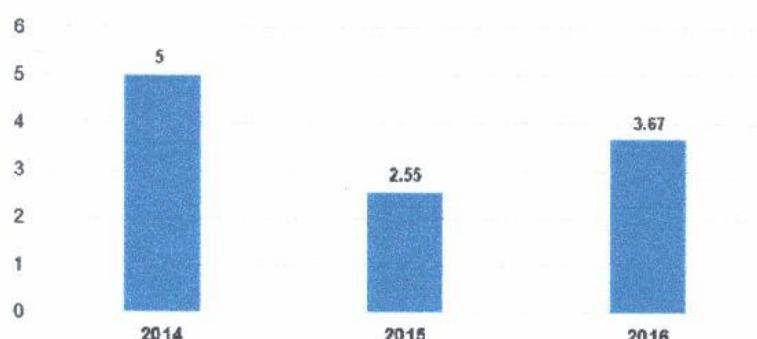
Gambar 3. 4: Perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Kota Mojokerto Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - 2017

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Pemerataan akan menciptakan landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan menjamin pertumbuhan berkelanjutan, karena pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Pola pertumbuhan yang tepat bukan yang vertikal, menghasilkan *trickle-down*, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi

haruslah yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni broadly based, employment intensive, dan tidak terkompartimentalisasi.

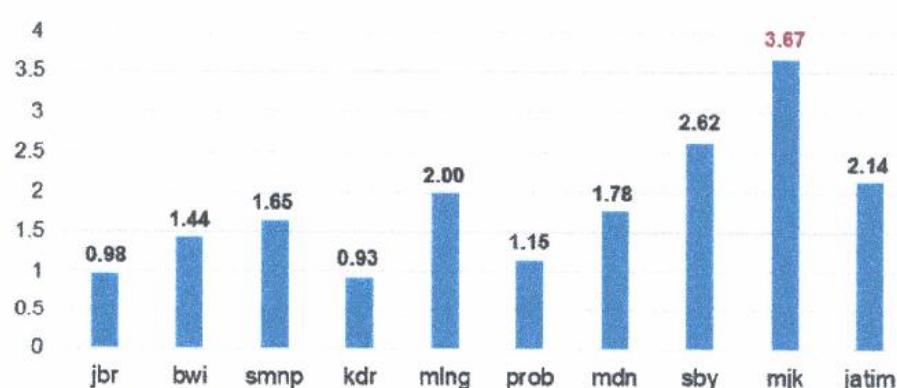
Selain memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi, dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah dan untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian daerah juga harus memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Mojokerto. Tingkat inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Bila melihat pada rumus perhitungan inflasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), besar kecilnya inflasi disebabkan oleh adanya perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 7 kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/ jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Dengan melihat data inflasi apakah perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Berikut dapat diketahui perkembangan laju inflasi di Kota Mojokerto beberapa tahun terakhir dan perbandingan inflasi kumulatif pada 8 kabupaten/ kota di Jawa Timur tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 3. 5: Perkembangan Laju Inflasi Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2016

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , 2016



Gambar 3. 6: Perbandingan Inflasi Kumulatif pada 8 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2016

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , 2016

Inflasi Kota Mojokerto pada tahun 2016 mencapai 3,67% atau mengalami peningkatan sebesar 1,12% dibandingkan pada tahun 2015. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan 8 Kabupaten/ Kota lainnya, inflasi yang terjadi di Kota Mojokerto pada tahun 2016 tergolong lebih tinggi, dimana rata-rata inflasi di Jawa Timur hanya mencapai 2,14%. Tingginya inflasi Kota Mojokerto pada tahun 2016 disebabkan terjadinya peningkatan harga-harga pada komoditas bahan makanan pada bulan Januari hingga April, serta Juni dan Juli pada saat mendekati hari raya. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/ daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/ investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi.

3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Melihat penetapan target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2018 yang dirasa terlalu tinggi, serta perlunya penyesuaian sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan daerah di Kota Mojokerto tahun 2018. Dilihat dari pergeseran komponen pendapatan, secara umum target pendapatan diturunkan. Komponen target pendapatan yang diturunkan yaitu pada komponen Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3. 7: Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018

NO.	URAIAN	Realisasi Anggaran				
		2015	2015	2017	2018 (APBD)	2018 P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	Rp717,544,07 9,472.41	Rp806,770,15 9,042.56	Rp779,427,03 1,566.20	Rp892,128,79 8,000.00	Rp882,836,256 ,638.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp129,258,13 2,763.41	Rp152,460,36 0,279.56	Rp174,815,58 9,983.20	Rp200,642,75 7,500.00	Rp206,490,041 ,138.00
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp31,324,086 ,639.85	Rp35,333,988 ,082.55	Rp47,423,790 ,376.20	Rp37,410,105 ,000.00	Rp40,103,105, 000.00
	Hasil Retribusi Daerah	Rp11,862,967 ,589.50	Rp13,004,631 ,686.46	Rp7,665,385, 740.54	Rp8,754,856, 000.00	Rp9,366,987,0 00.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp3,566,250, 784.99	Rp3,448,803, 749.90	Rp3,616,145, 197.93	Rp3,723,450, 000.00	Rp3,802,746,0 00.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp82,504,827 ,749.07	Rp100,672,93 6,760.65	Rp116,110,26 8,668.53	Rp150,754,34 6,500.00	Rp153,217,203 ,138.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp457,456,08 8,791.00	Rp555,817,06 2,047.00	Rp519,915,69 3,584.00	Rp549,700,25 0,000.00	Rp539,824,331 ,000.00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp50,992,997 ,791.00	Rp55,436,957 ,047.00	Rp50,450,522 ,033.00	Rp74,580,997 0,000.00	Rp75,907,794, 000.00
	Dana Alokasi Umum	Rp382,373,63 7,000.00	Rp397,094,49 8,000.00	Rp390,118,82 5,000.00	Rp390,118,82 5,000.00	Rp378,916,109 ,000.00
	Dana Alokasi Khusus	Rp24,089,454 ,000.00	Rp103,285,60 7,000.00	Rp78,771,947 2,266.00	Rp115,000,00 0,000.00	Rp85,000,428, 000.00

NO.	URAIAN	Realisasi Anggaran				
		2015	2016	2017	2018 (APBD)	2018 P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional			Rp574,399,28 5.00		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp130,829,85 7,918.00	Rp98,492,736 ,716.00	Rp84,695,747 ,999.00	Rp141,785,79 0,500.00	Rp136,521,884 ,500.00
	Pendapatan Hibah				Rp14,927,600 ,000.00	Rp14,927,600, 000.00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp38,991,755 ,918.00	Rp57,047,057 ,716.00	Rp71,619,577 ,999.00	Rp59,103,660 ,500.00	Rp53,839,754, 500.00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp75,302,399 ,000.00	Rp39,955,923 ,000.00	Rp7,500,000, 000.00	Rp66,750,000 ,000.00	Rp66,750,000, 000.00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp16,535,703 ,000.00	Rp1,489,756, 000.00	Rp5,575,330, 000.00	Rp1,004,530, 000.00	Rp1,004,530,0 00.00
	Pendapatan Lainnya			Rp840,000.00		

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Terdapat dua sub komponen yang targetnya diturunkan yaitu pada sub komponen Dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Komponen dana Perimbangan yang diturunkan cukup signifikan adalah pada sub komponen dana alokasi khusus. Pada komponen tersebut target diturunkan sebesar 26,09% dari target yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2018. Sedangkan untuk sub komponen dana alokasi umum, hanya diturunkan sebesar 2,87%. Pada komponen lain lain pendapatan yang sah, hanya terdapat satu sub komponen yang targetnya diturunkan, yaitu pada sub komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pada sub komponen tersebut, target diturunkan sebesar 8,91% dari target yang telah ditetapkan pada tahun APBD Tahun 2018.

Tabel 3. 8: Perubahan Target APBD 2018

NO.	URAIAN	Perubahan Target APBD 2018			
		2018 (APBD)	2018 P	Selisih	
		Target APBD	Perubahan Target APBD	Rp	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PENDAPATAN	Rp892,128,798,0 00.00	Rp882,836,256,63 8.00	(Rp9,292,541,3 62.00)	-1.04%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp200,642,757,5 00.00	Rp206,490,041,13 8.00	Rp5,847,283,6 38.00	2.91%
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp37,410,105,00 0.00	Rp40,103,105,000. 00	Rp2,693,000,0 00.00	7.20%
	Hasil Retribusi Daerah	Rp8,754,856,000. 00	Rp9,366,987,000.0 0	Rp612,131,000 .00	6.99%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp3,723,450,000. 00	Rp3,802,746,000.0 0	Rp79,296,000. 00	2.13%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp150,754,346,5 00.00	Rp153,217,203,13 8.00	Rp2,462,856,6 38.00	1.63%
1.2	DANA PERIMBANGAN	Rp549,700,250,0	Rp539,824,331,00	(Rp9,875,919,0)	-1.80%

NO.	URAIAN	Perubahan Target APBD 2018			
		2018 (APBD)	2018 P	Selisih	
		Target APBD	Perubahan Target APBD	Rp	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
		00.00	0.00	00.00)	
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp74,580,997,00 0.00	Rp75,907,794,000. 00	Rp1,326,797,0 00.00	1.78%
	Dana Alokasi Umum	Rp390,118,825,0 00.00	Rp378,916,109,00 0.00	(Rp11,202,716, 000.00)	-2.87%
	Dana Alokasi Khusus	Rp115,000,000,0 00.00	Rp85,000,428,000. 00	(Rp29,999,572, 000.00)	-26.09%
	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp141,785,790,5 00.00	Rp136,521,884,50 0.00	(Rp5,263,906,0 00.00)	-3.71%
	Pendapatan Hibah	Rp14,927,600,00 0.00	Rp14,927,600,000. 00	Rp0.00	0.00%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp59,103,660,50 0.00	Rp53,839,754,500. 00	(Rp5,263,906,0 00.00)	-8.91%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp66,750,000,00 0.00	Rp66,750,000,000. 00	Rp0.00	0.00%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp1,004,530,000. 00	Rp1,004,530,000.0 0	Rp0.00	0.00%
	Pendapatan Lainnya				

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

3.2.2 Belanja Daerah

Sebagaimana pada komponen Pendapatan dalam APBD, target pada komponen belanja juga mengalami perubahan. Jumlah target belanja yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp968,279,120,000.00. Target tersebut dinaikkan menjadi sebesar Rp957,546,622,200.00. Perubahan target pada komponen belanja tersebut dipengaruhi oleh dua komponen belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada komponen belanja tidak langsung, target dinaikkan sebesar 6,24%. Sedangkan pada komponen belanja tidak langsung, target diturunkan sebesar 5,44%.

Tabel 3. 9: Realisasi Belanja Tahun 2015-2018

NO.	URAIAN	Realisasi Anggaran				
		2015	2016	2017	2018 (APBD)	2018 P
					Target APBD	Perubahan Target APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	BELANJA	Rp706,783,75 1,688.70	Rp944,717,143 ,504.53	Rp739,098,0 63,899.78	Rp968,279,12 0,000.00	Rp957,546,62 2,200.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp281,090,10 6,457.00	Rp277,418,352 ,958.00	Rp256,739,3 36,674.00	Rp358,854,13 4,350.00	Rp381,254,37 7,890.00
	Belanja Pegawai	Rp252,510,49 8,551.00	Rp261,869,356 ,126.00	Rp226,764,5 24,318.00	Rp314,012,67 4,800.00	Rp336,033,7 18,340.00

NO.	URAIAN	Realisasi Anggaran					
		2015	2016	2017	2018 (APBD)	Perubahan Target APBD	2018 P Target APBD
					(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Belanja Hibah	Rp26,112,242, 800.00	Rp13,201,042, 100.00	Rp26,154,10 4,500.00	Rp37,433,007 ,700.00	Rp37,812,20 7,700.00	
	Belanja Bantuan Sosial	Rp1,988,500,0 00.00	Rp1,829,303,5 00.00	Rp3,243,260 ,000.00	Rp5,218,600, 000.00	Rp5,218,600, 000.00	
	Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa						
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp456,238,65 6.00	Rp518,651,232 .00	Rp562,049,8 56.00	Rp562,050,50 0.00	Rp562,050,5 00.00	
	Belanja Tidak Terduga	Rp22,626,450. 00	Rp0.00	Rp15,398,00 0.00	Rp1,627,801, 350.00	Rp1,627,801, 350.00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp425,693,64 5,231.70	Rp667,298,790 ,546.53	Rp482,358,7 27,225.78	Rp609,424,98 5,650.00	Rp576,292,24 4,310.00	
	Belanja Pegawai	Rp36,973,476, 666.00	Rp49,435,202, 231.00	Rp52,648,08 5,986.00	Rp42,538,316 ,500.00		
	Belanja Barang dan Jasa	Rp252,751,32 0,469.04	Rp314,086,488 ,984.39	Rp308,252,5 46,286.68	Rp367,449,87 6,050.00		
	Belanja Modal	Rp135,968,84 8,096.66	Rp303,777,099 ,331.14	Rp121,458,0 94,953.10	Rp199,436,79 3,100.00		
	SURPLUS / DEFISIT	Rp10,760,327, 783.71	(Rp137,946,98 4,461.97)	Rp40,328,96 7,666.42	(Rp76,150,32 2,000.00)	(Rp74,710,36 5,562.00)	

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Sub komponen belanja tidak langsung yang mengalami perubahan adalah Belanja pegawai dan belanja hibah. Perubahan yang cukup signifikan adalah pada sub komponen belanja pegawai, yaitu sebesar 7,01% dari APBD yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada sub komponen belanja hibah hanya dinaikkan sebesar 1,01%.

Tabel 3. 10: Perubahan target Anggaran Belanja tahun 2018

NO.	URAIAN	Perubahan Target Anggaran			
		2018 (APBD)	2018 P	Selisih	
				Target APBD	Perubahan Target APBD
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	BELANJA	Rp968,279,120,000 .00	Rp957,546,622,2 00.00	(Rp10,732,497,800 00)	-1.11%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp358,854,134,350 .00	Rp381,254,377,8 90.00	Rp22,400,243,540. 00	6.24%
	Belanja Pegawai	Rp314,012,674,80 0.00	Rp336,033,718, 340.00	Rp22,021,043,540. 00	7.01%
	Belanja Hibah	Rp37,433,007,700. 00	Rp37,812,207,7 00.00	Rp379,200,000.00	1.01%
	Belanja Bantuan Sosial	Rp5,218,600,000.0 0	Rp5,218,600,00 0.00	Rp0.00	0.00%

NO.	URAIAN	Perubahan Target Anggaran			
		2018 (APBD)	2018 P	Selisih	
		Target APBD	Perubahan Target APBD	Rp	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp562,050,500.00	Rp562,050,500.00	Rp0.00	0.00%
	Belanja Tidak Terduga	Rp1,627,801,350.00	Rp1,627,801,350.00	Rp0.00	0.00%
2.2	BELANJA LANGSUNG	Rp609,424,985,650.00	Rp576,292,244,310.00	(Rp33,132,741,340.00)	-5.44%
	Belanja Pegawai	Rp42,538,316,500.00		(Rp42,538,316,500.00)	100.00%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp367,449,876,050.00		(Rp367,449,876,050.00)	100.00%
	Belanja Modal	Rp199,436,793,100.00		(Rp199,436,793,100.00)	100.00%
	SURPLUS / DEFISIT	(Rp76,150,322,000.00)	(Rp74,710,365,562.00)	Rp1,439,956,438.00	-1.89%

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pada komponen pembiayaan daerah juga mengalami perubahan. Jumlah target Pembiayaan yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp76,150,322,000.00. target tersebut diturunkan 1,89% menjadi sebesar Rp74,710,365,562.00. Pada komponen ini, hanya dipengaruhi oleh komponen penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan pada komponen pengeluaran pembiayaan daerah tidak terdapat perubahan. Pada komponen penerimaan pembiayaan daerah terdapat sub komponen yang mengalami penurunan, yaitu pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Target pada sub komponen diturunkan 1,90%, dari target yang telah ditetapkan pada APBD 2018.

Tabel 3. 11: Realisasi Pembiayaan Tahun 2015-2018

NO.	URAIAN	Realisasi Anggaran				
		2015	2016	2017	2018 (APBD)	2018 P
					Target APBD	Perubahan Target APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp194,695,546,889.87	Rp172,525,076,673.58	Rp31,167,153,996.61	Rp76,150,322,000.00	Rp74,710,365,562.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp166,994,046,689.87	Rp172,373,021,673.58	Rp31,114,933,996.61	Rp75,850,322,000.00	Rp74,410,365,562.00
	Penerimaan Piutang Daerah	Rp2,701,500,200.00	Rp152,055,000.00	Rp52,220,000.00	Rp300,000,000.00	Rp300,000,000.00

NO.	URAIAN	Realisasi Anggaran					
		2015	2016	2017	2018 (APBD)	2018 P	
					Target APBD	Perubahan Target APBD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	Penerimaan Kembali Deposito Pemerintah Daerah	Rp25,000,00 0,000.00		Rp0.00			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp33,082,85 3,000.00	Rp3,465,000 ,000.00				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp13,082,85 3,000.00	Rp3,465,000 ,000.00				
	Investasi Jangka Pendek berupa Deposito	Rp20,000,00 0,000.00					
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp161,612,6 93,889.87	Rp169,060,0 76,673.58	Rp31,167,15 3,996.61	Rp76,150,32 2,000.00	Rp74,710,36 5,562.00	

Sumber: Bappeko Mojokerto, 2018

Tabel 3. 12: Perubahan Target Pembiayaan Tahun 2018

NO.	URAIAN	Perubahan Target APBD 2018			
		2018 (APBD)	2018 P	Selisih	
				Target APBD	Perubahan Target APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp76,150,322, 000.00	Rp74,710,365,5 62.00	(Rp1,439,956,4 38.00)	-1.89%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp75,850,322, 000.00	Rp74,410,365,5 62.00	(Rp1,439,956,4 38.00)	-1.90%
	Penerimaan Piutang Daerah	Rp300,000,000, .00	Rp300,000,000, 00	Rp0.00	0.00%
	Penerimaan Kembali Deposito Pemerintah Daerah				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	Investasi Jangka Pendek berupa Deposito				
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp76,150,322, 000.00	Rp74,710,365,5 62.00	(Rp1,439,956,4 38.00)	-1.89%

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja:

- a. Pembangunan bersifat **holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait**
- b. Pembangunan **untuk manusia dan masyarakat** harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*)
- c. Pembangunan **tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar**
- d. Pembangunan **tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem**
- e. Pembangunan harus mendorong **tumbuh berkembangnya swasta** dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan



Gambar 4. 1: Arah kebijakan pembangunan RPJMN 2018

Secara nasional hal yang perlu diperhatikan dari arah kebijakan pemerintah pusat adalah:

1. Pemerintah Daerah harus mengusung Program Prioritas Nasional untuk masuk kedalam RPJM Daerah;
2. Menggunakan pendekatan Perencanaan Terintegrasi terhadap Program Prioritas Pembangunan Nasional;
3. Berorientasi pada *"money follow program"* daripada *"money follow functions"* artinya review atas Kapasitas Kelembagaan menjadi penting;
4. Nomenklatur Program hanya sebagai 'rumah' dan dokumen penganggaran (karena melekat kode rekening anggaran), yang terpenting adalah definisi dari program tersebut dan kegiatan prioritas di dalam program tersebut;
5. Anggaran dan konsumsi pemerintah akan relatif lebih terbatas seiring ruang fiskal yang sempit dan memprioritaskan pada alokasi belanja modal yang profit dan revenue
6. Fokus terhadap pelaksanaan program yang langsung kepada rakyat dan dapat diukur;
7. Fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta yang disebabkan kapasitas fiskal yang terbatas dan berakibat pada terbatasnya investasi yang berasal dari pemerintah

8. Pembiayaan dan kapasitas fiskal pemerintah pusat lebih memfokuskan diri terhadap pembangunan yang bersifat prioritas nasional dan mendukung pembiayaan daerah yang sesuai dengan program prioritas nasional

4.2 Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2019

Penekanan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional terhadap keberadaan Kota Mojokerto didasarkan pada karakteristik sekaligus potensi yang dapat dikembangkan Kota Mojokerto dalam kerangka sebuah sistem pembangunan nasional. Selain arah kebijakan dan strategi nasional, perlu ditelaah penetapan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2018 dalam cakupan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Strategi umum pembangunan Jawa Timur 2014-2019 secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya (*affirmative*) kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin, atau disebut *pro-poor growth*, yang dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (*trade-off*) satu terhadap lainnya. Penegasan keberpihakan ini sejalan dengan label misi "**Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik**", di mana wong cilik atau rakyat miskin tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan dalam memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Secara umum arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan pada periode tersebut. Adapun Visi Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 tersebut adalah *Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhhlak*, sedangkan misi untuk mendukung visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Visi dan misi tersebut bersifat umum, artinya secara menyeluruh visi dan misi tersebut ditujukan kepada setiap wilayah administratif yang berada di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, tidak berarti pemerintah Provinsi dalam memformulasikan RPJMD tidak memberikan mandat secara teknis yang secara langsung ditujukan kepada wilayah Kabupaten/Kota tertentu di Provinsi Jawa Timur. Secara khusus Kota Mojokerto, sebagai wilayah yang masuk ke dalam *cluster wilayah pembangunan metropolitan*, Kota Mojokerto mendapat mandat pembangunan sebagaimana wilayah lain yang masuk kedalam cluster tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kelengkapan infrastruktur wilayah yang berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang dapat mendorong penyebaran berbagai komoditas, hasil-hasil pertanian dan bahan baku industri serta meningkatkan mobilitas manusia.
3. Pengembangan pusat kawasan agroindustri.
4. Pengembangan kegiatan dikawasan perkotaan yang meliputi perikanan, industry, dan perdagangan jasa
5. Pengembangan kawasan pariwisata
6. Pengembangan aksesibilitas antar kawasan pusat permukiman perkotaan

7. Peningkatan pengelolaan sistem permukiman dan kepulauan secara bersama-sama
8. Pengembangan industri yang bebasiskan hasil pertanian industri ekstraktif dan industri manufakturing yang berupa kawasan-kawasan industri (*Shorebase Industri Estate*)
9. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan
10. Pengembangan industri kecil/kerajinan tangan.
11. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
12. Pengembangan energi baru terbarukan
13. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
14. Peningkatan investasi padat karya
15. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana.

Jika diamati, mandat tersebut telah diakomodir kedalam visi dan misi pembangunan RPJMD Mojokerto periode 2014-2019. Secara spesifik, pada tahun pembangunan 2018 akan mengakomodir setidaknya 7 poin diatas yaitu mencakup: 1) Pengembangan pusat kawasan agroindustry; 2) Pengembangan kegiatan dikawasan perkotaan yang meliputi perikanan, industry, dan perdagangan jasa; 3) Pengembangan kawasan pariwisata; 4) Pengembangan aksesibilitas antar kawasan pusat permukiman perkotaan; 5) Pengembangan industri yang bebasiskan hasil pertanian industri ekstraktif dan industri manufakturing yang berupa kawasan-kawasan industri (*Shorebase Industri Estate*); 6) Pengembangan industri kecil/kerajinan tangan; dan 7) Peningkatan investasi padat karya.

Keberlanjutan pembangunan yang merata mengharuskan adannya integrasi linear antara tema pembangunan pusat, regional dan daerah. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur menekankan keberpihakkannya (*affirmativeness*) pada Wong Cilik sebagaimana akan diusung hingga tahun 2019. Rancangan akhir RKPD tahun 2018 tentunya harus memiliki lineartis tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada Arah pembangunan Jawa Timur yang diadopsi dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala daerah. Beberapa hari yang lalu Provinsi Jawa Timur tengah mengadakan Musrenbang yang melahirkan tema RKPD tahun 2018 yaitu "**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk pertumbuhan dan Pemerataan**". Berdasarkan tema tersebut maka arah kebijakan pembangunan Jawa Timur menekankan pada sektor riil dan kontributif pendukung peningkatan perekonomian Jawa Timur, Mempermudah sistem Birokrasi berkaitan dengan Investasi dan upaya pengentasan kemiskinan demi upaya menjaga stabilitas dan keamanan serta keteraturan sosial (*pro-poor*) untuk menarik jumlah investasi daerah. 10 prioritas Nasional yang menjadi Tolok ukur pembangunan 2018 dan diturunkan ke Tema RKPD Jawa Timur menghasilkan pokok-pokok 4 prioritas provinsi yaitu:

- a. Prioritas Pendidikan
 - Pendidikan Vokasi
 - Peningkatan kualitas guru
- b. Perumahan dan Permukiman
 - Penyediaan perumahan layak
 - Air bersih dan sanitasi
- c. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
 - Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
- d. Penanggulangan kemiskinan
 - Jaminan dan Bantuan Sosial tepat Sasaran
 - Pemenuhan Kebutuhan Standar
 - Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Tema RKP Jawa Timur identik dari adanya pembangunan ekonomi dan investasi jangka panjang di daerah dimana Jawa Timur menargetkan setidaknya ada enam sektur utama yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan yaitu (1) Industri Pengolahan (non migas); (2) Pertanian; (3) Perdagangan; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Konstruksi; (6) Jasa Keuangan. Sementara 3 sektori prioritas yang akan ditingkatkan perananya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yaitu: (1) Industri Pengolahan (migas); (2) Pertanian; (3) Pariwisata.

Keberlanjutan pembangunan yang merata mengharuskan adannya integrasi linear antara tema pembangunan pusat, regional dan daerah. Arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur menekankan keberpihakkannya (affirmativeness) pada Wong Cilik sebagaimana akan diusung hingga tahun 2019. Rancangan Awal RKPD tahun 2018 tentunya harus memiliki lineartis tema dan arah pembangunan yang didasarkan pada Arah pembangunan Jawa Timur yang diadopsi dan disesuaikan dengan Tema Kepada daerah. Pemerintah Jawa Timur telah menetapkan bahwa Tema dan Arah Pembangunan dituangkan dalam tema **“Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**

4.3 Telaah RPJMD 2014-2019 dan Arah Kebijakan 2018

Periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 merupakan tahun keempat setelah penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mojokerto periode tahun 2014-2019. Prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2018 memfokuskan berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2017, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2017, program indikatif di tahun 2017 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kota Mojokerto 2008-2013, serta dokumen Rancangan akhir RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJM Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan telaah prioritas RPJMN 2015-2019 dan isu-isu kebijakan nasional.

Isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan pembangunan Kota Mojokerto diantaranya adalah: 1) kesiapan masyarakat menghadapi era perdagangan bebas dalam masyarakat ekonomi asean (MEA); 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari KKN sebagai implementasi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3) implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 4) implementasi UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana yang terakhir kali telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5) kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah; 6) kesinambungan pembangunan dengan visi dan misi sebelumnya; 7) keberadaan RPJPD Kota Mojokerto tahun 2005-2025.

Arah pembangunan Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2014-2019) pada dasarnya adalah proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing dalam bidang ekonomi, baik domestik maupun regional, Asean maupun internasional. Pembangunan Kota Mojokerto ke depan, diharapkan proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik, mental dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial, budaya, kesehatan, pendidikan peningkatan budi pekerti yang luhur, wawasan kebangsaan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, ketaatan pada norma-norma agama dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan. Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang

kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kota Mojokerto periode tahun 2014-2019 yaitu:

“Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral”.

Penjelasan dari visi kota Mojokerto adalah Mewujudkan kota sebagai **Service City**, berarti menciptakan suasana birokrasi yang kompeten secara profesional memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai citizen. Memudahkan proses birokrasi, memangkas waktu dan biaya kepengurusan administrasi yang efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagaimana masyarakat dianggap bukan sebagai sipil namun sebagai masyarakat yang aktif dan turut andil dalam memberikan masukan pembangunan

Penjelasan dari visi Kota Mojokerto yang **Maju** dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan baik jasmani, rohani maupun ekonomi dengan target meningkatkan perekonomian baik lokal maupun investasi dengan tujuan mencapai angka ekonomi yang tinggi serta memberikan masyarakat daya beli yang tinggi dan berkualitas. Maka kata maju juga diartikan bahwa Kota Mojokerto diharapkan mampu menjadi kota yang lebih modern berkaitan dengan kota Mojokerto selaku Service City yang menggunakan Teknologi berbasis IT. Administrasi dan urusan pemerintahan dilaksanakan melalui e-planning dan e-budgeting yang secara bersamaan selesai secara efektif dan efisien

Makna dari **Kata Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral** memiliki definisi yang luas dan merupakan satu kesatuan dimana upaya Kota Mojokerto adalah pada bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Menciptakan SDM yang kompetitif dalam menghadapi perekonomian global, memberikan wacana dan pendidikan moral kepada anak sekolah Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Upaya kesehatan dengan menurunkan angka kematian dan mempermudah proses administrasi kesehatan bagi masyarakat umum. Konsep bermoral juga ditanamkan pada aparatur pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas

Untuk mewujudkan Visi Kota Mojokerto tersebut maka Misi Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi
- c. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai.
- d. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tenram.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*clean government*)

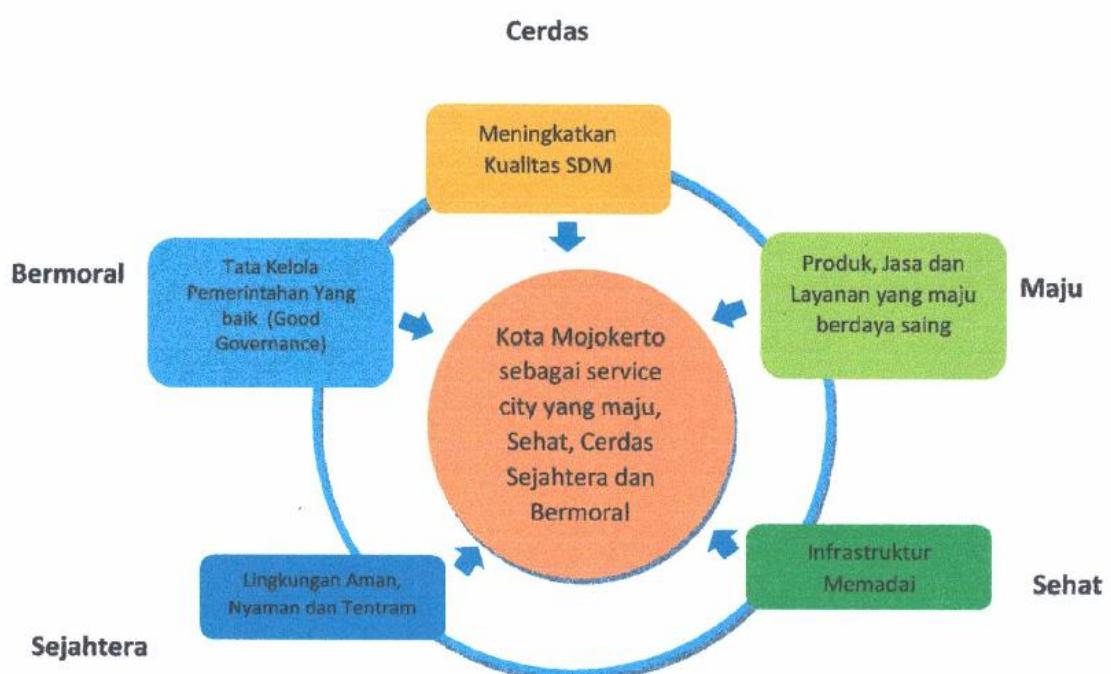
Visi dan Misi Kota Mojokerto periode tahun 2014-2019, dirumuskan dan dijabarkan ke dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari pembangunan Kota Mojokerto tahun 2014-2019 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Penjabaran Pokok-Pokok Visi Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

Visi: "Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i> yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral"	
Pokok-pokok Visi	Penjabaran Visi
Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i>	<p>Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi</p> <p>1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya</p> <p>2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumber daya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai</p>
Kota Mojokerto sebagai <i>Service city yang maju</i>	<p>Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh:</p> <p>1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya</p> <p>2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien</p> <p>3. iklim usaha yang kondusif dan mandiri</p> <p>4. Memiliki daya saing tinggi</p> <p>5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima</p>
Kota Mojokerto sebagai <i>Service city yang sehat</i>	<p>Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang</p> <p>1. lingkungan yang bersih dan bebas polusi</p> <p>2. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus</p> <p>3. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi</p> <p>4. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.</p> <p>5. Tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.</p>
Kota Mojokerto sebagai <i>Service city yang cerdas</i>	<p>antara lain ditandai oleh:</p> <p>1. sumber daya manusia yang berkualitas</p> <p>2. pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi</p> <p>3. tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi</p> <p>4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi</p>
Kota Mojokerto sebagai <i>Service city yang sejahtera</i>	<p>Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai oleh:</p> <p>1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM</p> <p>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat</p>
Kota Mojokerto sebagai	Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya,

Visi: "Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai <i>service city</i> yang Maju Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral"	
<i>Service city</i> yang bermoral	agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial 2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman 4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma 5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (<i>clean and Good Governance</i>)

Berikut adalah gambar hubungan antara visi dan misi Kota Mojokerto periode 2014-2019 :



Gambar 4. 2: Hubungan Visi dan Misi Kota Mojokerto 2014-2019

Untuk mewujudkan pembangunan yang linear diperlukan sebuah dasar dan acuan OPD untuk membentuk Program kerja yang sistematis. Berdasarkan telaah Visi dan Misi kepala Daerah Kota Mojokerto tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto 2014-2019 pada **Tahun ke-4** yang sesuai dan ditarik kedalam arah kebijakan RKPD 2018 Kota Mojokerto yang telah disesuaikan dengan Milestone arah pembangunan Kota Mojokerto dalam RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019

Berdasarkan proyeksi dan telaah RPJMD Kota Mojokerto tahun 2014-2019 sebagai instrumen pembangunan jangka menengah yang telah diterjemahkan dalam bahasa teknokratik, evaluasi capaian kinerja tahun 2017 analisis isu-isu kebijakan nasional jangka panjang dan platform kepala daerah yang belum memperhatikan indikator-indikator kebijakan keuangan daerah baik secara makro maupun regional serta RKP pemerintah pusat dan Jawa Timur tahun 2018 maka Tema RKPD Kota Mojokerto tahun 2018 adalah "**Mewujudkan investasi dan kemandirian ekonomi daerah**". Merujuk tema tersebut maka dimaknai menjadi:

a. Mewujudkan investasi

Realisasi investasi merupakan wujud konkret pemerintah daerah dalam memberikan peluang usaha dan bisnis bagi perusahaan yang akan menanamkan modal ke daerah dengan tujuan profit yang secara eksplisit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan sosial. Dengan dibukanya pintu gerbang investasi usaha daerah maka secara implisit akan menyerap banyak tenaga kerja sekaligus memberikan masukkan pajak daerah sebagai kontribusi. Dalam satu sisi mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi tingkat ketimpangan disatu sisi pemasukkan daerah bertambah dan dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Mempermudah lajur pelayanan administrasi fokus pada investasi (*service*) dan menjamin keamanan dan ketertiban sosial adalah solusi kunci menarik investor ke daerah.

b. Kemandirian ekonomi daerah

Adalah salah satu upaya masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat melalui usaha-usaha mikro potensial dan industri berbagai usaha yang menjamin kemandirian peningkatan produk unggulan, pengembangan industri unggulan, industri kreatif, serta pemberian hak paten dari produk lokal. Dengan adanya perputaran uang dimasyarakat menyebabkan daya beli masyarakat semakin meningkat dan perekonomian juga meningkat.

c. Menciptakan iklim investasi

Untuk menciptakan iklim investasi yang potensial maka diperlukan faktor kondisi sosial yang mendukung, angka kriminalitas dan keamanan, sumberdaya yang memadai, geolokasi yang mendukung industri dan perusahaan untuk dibangun, sarana dan prasarana perhubungan dan birokrasi akuntabel (*service city*) menjadi faktor pokok besarnya peluang daerah untuk berinvestasi. Tentunya meningkatkan SDM dan Keamanan adalah kunci utama menarik investor.

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kota Mojokerto tahun 2018 maka prioritas pembangunan daerah Kota Mojokerto tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguatan SDM di Bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
2. Mengembangkan SDM yang komparatif wirausaha baru yang kompetitif;
3. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;
4. Optimalisasi infrastruktur sarana-prasana pendukung *service city*;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan;
6. Meningkatkan keberdayaan lembaga ekonomi;
7. Menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, nyaman dan waspada bencana.

Merujuk pada lima butir misi diatas didasarkan pada kebutuhan pembangunan yang telah ditentukan tematik pembangunannya dalam bentuk visi pembangunan daerah. Untuk memahami upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut maka untuk memberikan batasan-batasan serta mengurangi resiko keambiguitasan dalam memahami butir misi, maka penjabaran misi diatas dapat diperjelas sebagai berikut: